



MARAK PELANGGARAN KTR Perlu Kolaborasi Antarinstansi

YOGYA (KR) - Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu B menanggapi maraknya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DIY. Terutama Kota Yogyakarta.

"Pemkot bersama Pemda DIY harus berdiskusi bersama mengenai tata ruang, guna menghindari pelanggaran KTR lagi di kemudian hari," ujarnya, Minggu (18/5).

Ungkapan Dwi Wahyu tersebut merespons statement dari Pemkot Yogyakarta yang berencana menambah ruang khusus merokok atau smoking room di Malioboro. Apalagi beberapa waktu lalu sempat viral musisi yang kedapatan merokok di kawasan Malioboro saat live di media sosial.

Diskusi penting dilakukan. Mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta itu hanya 32,8 km persegi. Diskusi tersebut untuk menata kawasan untuk merokok. Tidak

hanya di kawasan Malioboro saja. Namun juga kawasan pariwisata lainnya.

Mengingat saat ini baik Pemkot maupun Pemda DIY juga sedang gencar-gencarnya membuat KTR. Sayangnya, di saat yang bersamaan tidak diimbangi dengan penyediaan tempat merokok. Jadi semestinya harus seimbang.

"Kalau ada KTR, ya harus ada tempat untuk merokok. Untuk itu pembahasan tata ruang itu penting. Tidak hanya di Kota Yogyakarta saja. Namun di empat kabupaten lainnya di DIY," jelasnya.

Selain koordinasi dengan instansi pemerintah, berkolaborasi dengan industri rokok juga penting dilakukan. Mengingat di sana ada CSR. Selain itu bagi hasil cukai dari industri tembakau juga selama ini cukup besar. "Mencapai 40 persen. Nah, kita ambil yang masuk di Dinas Kesehatan," ungkapnya.

(Awh)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005